

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan yang berkualitas yaitu laporan keuangan yang memberikan informasi yang memiliki karakteristik kualitatif sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang berkualitas merupakan tujuan dari organisasi sektor publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wewenang yang telah diberikan. Selain sebagai pertanggungjawaban atas wewenang yang telah diberikan, laporan keuangan juga merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah mengenai apa yang telah dikerjakan selama 1 tahun (Karsana dan Suaryana, 2017).

Isthika, dkk (2016) menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah dituntut untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas agar dapat berguna bagi penggunanya. Laporan keuangan yang berkualitas merupakan tujuan dari organisasi sektor publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wewenang yang telah diberikan. Laporan keuangan yang berkualitas juga dapat tercermin dari pendapat yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah haruslah berguna yaitu dapat memberikan dukungan dalam hal pengambilan keputusan serta

dapat meningkatkan pemahaman oleh para pengguna laporan keuangan (Huang*et al.*, 1999 dalam Xu*et al.*, 2003).

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalam laporan keuangan tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Dengan adanya informasi dari laporan keuangan ini juga diharapkan dapat memberi prediksi dimasa yang akan datang dan dapat mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan haruslah disajikan tepat waktu sehingga dapat berguna bagi pengambilan keputusan dan informasi yang disajikan harus lengkap dan terperinci. Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari kesalahan material, menyajikan setiap informasi secara jujur dan dapat diverifikasi. Informasi pada laporan keuangan yang disajikan harus diarahkan pada kepentingan umum dan tidak berpihak kepada pihak tertentu. Laporan keuangan dapat dikatakan dapat dibandingkan jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Laporan keuangan dikatakan dapat dipahami jika informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bermanfaat jika dapat dipahami oleh semua pihak yang menggunakan atau memerlukan laporan keuangan (Trisnawati dan Wiratmaja, 2018).

Fenomena yang terjadi dikutip dari berita republika.co.id, Rabu (4/10) yang berjudul “Audit Laporan Keuangan Pemda, BPK: Kerugian Capai Rp 1,13 T” dalam berita tersebut di infokan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia (BPK) menemukan 2.525 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selain mengakibatkan kerugian, permasalahan ketidakpatuhan juga mengakibatkan potensi kerugian sebanyak 413 permasalahan, 846 permasalahan kekurangan penerimaan, serta 2.331 permasalahan penyimpangan administrasi.

PP Nomor 71 Tahun 2010 terbit untuk menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005 dimana perubahan dalam kedua peraturan ini dapat dilihat dari sisi penyajian laporan keuangan. Dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 Pemerintah Daerah hanya menyajikan empat (4) laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sedangkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Pemerintah Daerah diwajibkan membuat tujuh (7) laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Perbedaan yang lain antara PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 terletak pada basisnya dimana PP Nomor 24 Tahun 2005 menggunakan basis kas menuju akrual sedangkan PP Nomor 71 Tahun 2010 menggunakan basis akrual. Adanya perubahan pada peraturan yang berlaku sedikit tidaknya akan berdampak pada satuan kerja pemerintahan (Pramana, 2016). Ada sedikit bukti tentang manfaat yang terkait dengan penerapan akuntansi berbasis

akrual, sementara akademisi telah meremehkan pentingnya akuntansi akrual disektor publik (Lapsley, 2009). Namun, banyak penelitian telah menganjurkan superioritas akuntansi berbasis akrual dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas sehingga alasan mengapa banyak organisasi sector publik internasional telah mengadopsi atau sedang dalam proses menerapkan prinsip akuntansi akrual (Connolly and Hyndman, 2006). Akuntansi akrual membantu memperbaiki keputusan manajer, memberikan biaya dan aktivitas layanan yang lebih transparan dan meningkatkan akuntabilitas manajer (Karbasi *et al.*, 2010).

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah kualitas sumber daya manusia. Masih rendahnya kualitas LKPD disebabkan oleh kualitas SDM yang kurang memadai (Subrata, 2017). Kualitas SDM adalah elemen yang sangat penting jadi sebab itu kualitas SDM harus selalu dipastikan pengelolaannya dilakukan dengan baik agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Afrianti, 2011). Pada penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dan Wiratmaja (2018) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Shintia dan Erawati (2017) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian

intern merupakan salah satu tolak ukur yang harus digencarkan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Karena sistem pengendalian intern mampu membentuk struktur organisasi, metode dan ukuran- ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pemerintah daerah (Udiyanti *et al.*, 2014). Dimana SPI ini merupakan salah satu elemen yang penting dalam memberikan akuntabilitas untuk memantau dan mengendalikan suatu organisasi (Jones, 2008). Sistem Pengendalian Intern merupakan tindakan yang dilakukan pada keuangan dan non keuangan untuk memastikan perlindungan atas aset, deteksi dan pencegahan penipuan, memenuhi persyaratan dan prosedur kebijakan internal control dan akurasi kelengkapan catatan (Abiola *et al.*, 2013). Jika suatu entitas telah menetapkan pengendalian intern dengan baik maka semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta berada di bawah kendali, tujuan akan tercapai, risiko menjadi kecil, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas (Weygandt *et al.*, 2005 dalam Trisnawati dan Wiratmaja, 2018). Tidak tercapainya pengendalian intern yang baik akan menyebabkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah buruk (Suwanda, 2015). Pada penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dan Wiratmaja (2018) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh Shintia dan Erawati (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan

keuangan pemerintah. Dan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Gayatri (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem informasi. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem dimulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Desiana, 2014). Pada penelitian yang dilakukan oleh Shintia dan Erawati (2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah sebuah sikap mental yang mewakili keinginan, kebutuhan dan kewajiban untuk melanjutkan pekerjaan dalam suatu organisasi, tiga komponen mengenai komitmen organisasi, yaitu: Komitmen afektif (*affective commitment*), Komitmen kontinu (*continuance commitment*), Komitmen normatif (*normative commitment*). Dari ketiga jenis komitmen tersebut, komitmen afektif adalah jenis yang paling diinginkan oleh perusahaan. Karyawan yang memiliki loyalitas, yaitu karyawan yang mempunyai

komitmen afektif akan cenderung tetap tinggal (bekerja dalam perusahaan). Komitmen dibutuhkan oleh organisasi agar sumber daya manusia yang kompeten dalam organisasi dapat terjaga dan terpelihara dengan baik (Indriasari, 2008). Pada penelitian yang dilakukan oleh Shintia dan Erawati (2017) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Noprial (2015) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa jika komitmen organisasi dalam setiap SKPD baik, maka akan mempengaruhi hasil laporan keuangan SKPD tersebut. Jika komitmen organisasi SKPD baik, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang baik pula.

Faktor kelima yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah motivasi kerja. Motivasi menurut (Luthans, 1992 dalam Setiawan dan Gayatri, 2017) berasal dari kata latin *movere*, artinya “bergerak”. Motivasi merupakan suatu proses yang dimulai dengan adanya kekurangan psikologis atau kebutuhan yang menimbulkan suatu dorongan dengan maksud mencapai suatu tujuan atau insentif. Sedangkan menurut (Handoko, 2003:74 dalam Setiawan dan Gayatri, 2017) motivasi adalah sebagai keadaan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Menurut (Sopiah, 2008:179 dalam Setiawan dan Gayatri, 2017) motivasi adalah keadaan dimana usaha dan kemauan keras seseorang diarahkan kepada pencapaian hasil-hasil atau tujuan tertentu. Pegawai dengan motivasi tinggi

juga diharapkan memiliki komitmen kepada organisasi yang tinggi; cenderung memiliki kepuasan kerja yang tinggi, dan pada akhirnya berkinerja tinggi (Xiaohua, 2008 dalam Setiawan dan Gayatri, 2017). Motivasi menekankan pada faktor-faktor personal dan situasional, yang telah dikembangkan teori motivasi, yang dinilai berdampak penting terhadap pencapaian produktivitas dan keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, motivasi pada konteks ini, memfokuskan pada perilaku karyawan dalam menunaikan tugas-tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan organisasi. Pada konteks pekerjaan tersebut, pencapaian tujuan dan tugas-tugas yang diharapkan organisasi perlu dilihat dalam perspektif transaksional atau pertukaran yaitu adanya transfer nilai secara timbal balik antara individu dengan organisasi secara bersamaan melalui proses pertukaran tersebut (Kanfer, 1999). Pada penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Gayatri (2017) menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.

Faktor keenam yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan. Kebijakan tentang asset tetap yang belum memadai akan menyebabkan kualitas laporan keuangan menjadi kurang maksimal dan hal itu mencerminkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan belum efektif. Hal ini seharusnya tidak terjadi mengingat bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah selesai disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) pada tahun 2010 dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP No. 71 Tahun 2010. Peraturan tersebut menyatakan

bahwa laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dan paling lambat tahun 2015 seluruh laporan keuangan pemerintah daerah sudah menerapkan SAP berbasis akrual (Ningtyas, 2016). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara efektif, akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kussekaranh (2012), Putra dan Amar (2015) dan Ningtyas (2015) yang menyatakan bahwa efektifitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Karsana dan Suaryana (2017) menunjukkan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dan Wiratmaja (2018), dengan objek penelitian pada organisasi perangkat daerah. Alasan penulis melakukan replikasi adalah untuk menguji kembali kebenaran bahwa beberapa karakteristik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang direplikasi yang pertama adalah penambahan variabel independen. Pada penelitian sebelumnya menggunakan dua variabel, yaitu kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern. Sedangkan pada penelitian ini telah ditambahkan empat variabel independen yaitu sistem informasi, komitmen organisasi, motivasi kerja dan efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan. Alasan

ditambahkan variabel tersebut agar variabel penelitian lebih beragam untuk mengidentifikasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan bahwa sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Juita, 2013). Trisnawati dan Wiratmaja (2018) menyebutkan bahwa kurangnya kualitas SDM ini dapat disebabkan karena dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, banyak staf keuangan dalam OPD yang bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi, hal tersebut juga dapat mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah. Karena terjadi perbedaan pendapat yang dilakukan oleh penelitian dari (Juita, 2013) dan Trisnawati dan Wiratmaja (2018) maka penulis ingin meneliti kembali dan mengembangkannya pada penelitian ini supaya penelitian tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah lebih berkembang dalam memberikan gambaran hasil penelitian yang berbeda serta hasilnya dapat lebih maksimal dan akurat.

Perbedaan kedua yaitu pada objek penelitian, penelitian sebelumnya dilakukan pada OPD yang ada di Kabupaten Gianyar, sedangkan penelitian ini dilakukan pada OPD yang ada di Kabupaten Kudus.

Perbedaan ketiga yaitu pada tahun penelitian, penelitian sebelumnya dilakukan tahun 2018, sedangkan penelitian ini dilakukan di tahun 2019.

Adanya perbedaan pendapat antar peneliti dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan tersebut, maka menimbulkan

fenomena dan mendorong peneliti untuk meneliti ulang dengan judul **“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi, Komitmen Organisasi, Motivasi Kerja dan Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus)”**.

1.2. Ruang Lingkup

Karena luasnya pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk mempermudah pembahasan serta menghindari kesalahan melakukan pembahasan dalam penelitian, maka penulis membatasi ruang lingkup pokok pembahasan dalam permasalahan sebagai berikut:

1. Variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Variabel dependen adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
 - b. Variabel independen adalah kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, sistem informasi, komitmen organisasi, motivasi kerja dan efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan.
2. Objek penelitian ini adalah OPD di Kabupaten Kudus.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah sistem informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
6. Apakah efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai:

1. Untuk menguji dan menganalisis kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji dan menganalisis sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji dan menganalisis sistem informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menguji dan menganalisis komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5. Untuk menguji dan menganalisis motivasi kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6. Untuk menguji dan menganalisis efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari Penelitian ini meliputi:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan memperkaya wawasan berdasarkan hasil penelitian Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi, Komitmen Organisasi, Motivasi Kerja dan Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta mampu memberikan kontribusi dalam bidang Akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan analisis laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Organisasi Perangkat Daerah. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan yang dianggap perlu berdasarkan hasil penelitian.
- b. Bagi Masyarakat. Sebagai sarana informasi dan memberikan gambaran awam terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya. Sebagai referensi khususnya bagi pihak-pihak lain untuk pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.

